

BAB 6

SARAN

Saran yang dapat diberikan selama menempuh PKPA di Apotek Kimia Farma 23 adalah sebagai berikut:

1. Calon Apoteker hendaknya mempersiapkan diri dengan banyak membaca dan membekali diri dengan ilmu tentang obat-obatan, pelayanan, perundangundangan, dan juga sistem manajemen baik di apotek tempat PKP maupun secara umum sebelum melaksanakan PKP.
2. Calon Apoteker hendaknya aktif dalam melaksanakan PKP Apoteker, karena sangat banyak pengetahuan dan keterampilan yang tidak diajarkan di perkuliahan dan bisa diperoleh pada saat PKP Apoteker sehingga sangat berguna ketika sudah terjun di dunia kerja.
3. Calon Apoteker hendaknya memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan berperilaku baik selama PKP Apoteker sehingga dapat berinteraksi dengan pegawai apotek lainnya baik apoteker, asisten apoteker, juru racik, maupun pegawai umum.
4. Apoteker sebaiknya lebih memperkenalkan diri sebagai apoteker saat KIE dan tidak hanya menyampaikan cara penggunaan obat tetapi juga menyampaikan efek samping dan terapi non farmakologi yang dapat dijalankan oleh pasien serta menunjukkan tanggal kadaluwarsa dari obat yang didapat oleh pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- BNFC org. 2009, *British National Formulary for children*, BMJ Publishing Group Ltd., London, UK.
- Depkes RI, 1997, Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Jakarta.
- Depkes RI, 2002, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1332/ Menkes/ SK/ X/ 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, Jakarta.
- Depkes RI, 2004, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Jakarta.
- Depkes RI, 2006, Pedoman Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas, Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Jakarta.
- Depkes RI, 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Jakarta.
- Depkes RI, 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, Jakarta.
- Depkes RI, 2009, Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jakarta.
- Depkes RI, 2009, Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan, Jakarta.

- Depkes RI, 2009, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Menteri Kesehatan, Jakarta.
- Depkes RI, 2014, Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Jakarta.
- Depkes RI, 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi, Jakarta.
- Depkes RI, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Jakarta.
- Depkes RI, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, Jakarta.
- Lacy, F.C., Lora, L.A., Morton, P.G., and Leonard, L.L., 2009, Drug Information Handbook 17th ed., American Pharmacists Association, New York.
- McEvoy, Gerald K., *et al.*, 2011, AHFS Drug Information, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, Maryland.
- MIMS Edisi Bahasa Indonesia Tahun 2018; MIMS, Referensi Obat, Informasi Ringkas Produk Obat Bahasa. Indonesia: Bhuana Ilmu Populer.
- Seto S., Nita Y., Triana L., 2012, Manajemen Farmasi, ed 3, Airlangga University Press, Surabaya.

Sweetman, S.C., 2009, Martindale: The Complete Drug Reference
36th ed., Pharmaceutical Press, London.

Tatro, D.S. et al. 2003. A to Z Drug Facts. Facts and Comparisons.